YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i1.9112

PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM JAKARTA UTARA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PEMILIH BARU MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH DI SMA/SMK

Role of Education and Socialization of the North Jakarta General Election Commission in Increasing New Voter Awareness through Voter Education Programs in Senior and Vocational High Schools

Natasya Puspa Adelia Nurak & Komang Adi Sastra Wijaya
Universitas Udayana
syaaadelia00@gmail.com; sastra_wijaya@unud.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 31, 2025	Jan 24, 2026	Feb 5, 2026	Feb 10, 2026

Abstract

Elections are the primary instrument for implementing democracy and require public participation and political awareness, particularly among first-time voters, while low levels of political literacy in this group remain a challenge to realizing high-quality elections. This study aimed to analyze the role of education and outreach conducted by the North Jakarta General Elections Commission (KPU Jakarta Utara) in enhancing the awareness of new voters through voter education programs at the senior and vocational high school (SMA/SMK) level. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. The findings show that the voter education programs organized by KPU Jakarta Utara contributed to increasing students' understanding of democratic values, voters' rights and obligations, and the importance of participation in elections. The delivery of material in an interactive and contextual manner encouraged active participant engagement and helped foster a

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

critical attitude toward electoral information. Although constraints were found, such as the influence of information circulating on social media and the varying characteristics of participants, the program was considered fairly effective in building the political awareness of first-time voters. These findings underscore that voter education in schools is a strategic effort to shape voters who are aware, critical, and responsible in the electoral democratic process.

Keywords: Voter Education; KPU Socialization; First-Time Voters; Political Awareness; Electoral Democracy

Abstrak: Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi yang menuntut partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih baru, sementara rendahnya literasi politik pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara dalam meningkatkan kesadaran pemilih baru melalui program pendidikan pemilih di tingkat SMA/SMK. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Jakarta Utara berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Penyampaian materi secara interaktif dan kontekstual mendorong keterlibatan aktif peserta dan membantu membangun sikap kritis terhadap informasi kepemiluan. Meskipun terdapat kendala berupa pengaruh informasi dari media sosial dan perbedaan karakteristik peserta, program ini dinilai cukup efektif dalam membangun kesadaran politik pemilih baru. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan pemilih di lingkungan sekolah merupakan upaya strategis dalam membentuk profil pemilih yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi elektoral.

Kata Kunci: Pendidikan Pemilih; Sosialisasi KPU; Pemilih Baru; Kesadaran Politik; Demokrasi Elektoral

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah alat bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan serta sebagai manifestasi dari sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa demokrasi memberikan peluang kepada warga untuk memilih para pemimpin yang akan bertindak sebagai perwakilan mereka. Pemilu menjadi simbol keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan arah pemerintahan melalui perwakilan yang ada di daerah selama satu periode (Dewi et al., 2022). Maka itu, pemilihan kepala daerah sangatlah krusial untuk memastikan terpilihnya pemimpin daerah yang mencerminkan keinginan dan harapan warga. Pemilihan umum berfungsi sebagai alat utama dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Kualitas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh penyelenggaraan teknis, tetapi juga

oleh tingkat kesadaran serta partisipasi publik sebagai pemilih. Mereka yang memahami arti dari hak suara akan mampu membuat pilihan yang logis, dengan dasar informasi yang memadai, dan menyadari konsekuensi dari keputusan politik yang diambil terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, rendahnya kesadaran politik dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya (golput), apatis terhadap politik, serta tindakan memilih tanpa mempertimbangkan substansi yang mendasarinya (Halilah, 2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelengggara teknis pemilu, seperti pencalonan, kampanye, pungut-hitung, dan penetapan hasil (Husni et al., 2021). KPU juga memiliki peran penting di luar tahapan pemilu, yaitu salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih. Hal ini tercantum dalam "Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah." Yang menyatakan bahwa KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilu (KPU, 2022). Selain itu, "Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum" menegaskan bahwa pendidikan pemilih harus diarahkan untuk membentuk pemilih yang cerdas, kritis, serta memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi (KPU, 2018). Salah satu tugas KPU di luar tahapan pemilu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di periode antar pemilu melalui Pendidikan masyarakat (Purnamasari & Rahim, 2025). Edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kesadaran politik tidak hanya muncul pada saat menjelang hari pemungutan suara, melainkan menjadi sikap warga negara sepanjang waktu. Melalui kegiatan Pendidikan pemilih, KPU berupaya membangun pola pikir bahwa mengggunakan hak pilih merupakan bentuk tanggung jawab warga negara terhadap masa depan bangsa, dan bukan hanya kegiatan rutinitas politik lima tahunan.

Kelompok strategis yang menjadi perhatian utama dalam Pendidikan pemilih adalah pemilih baru, yaitu siswa dan siswi SMA/SMK yang baru mencapai usia 17 tahun dan akan ikut serta dalam pemilu untuk pertama kalinya. Mereka adalah generasi digital yang berada di tengah peredaran informasi yang sangat cepat, tetapi pemahaman mereka mengenai literasi politik dan pengetahuan tentang demokrasi sering kali masih terbatas. Kekurangan dalam pemahaman ini membuat pemilih baru rentan terhadap pengaruh informasi yang salah dan upaya manipulasi informasi, serta mudah terperosok dalam politik identitas atay memilih

berdasarkan emosi semata. Oleh sebab itu, pendidikan politik sejak usia dini menjadi Langkah yang sangat krusial untuk membentuk generasi pemilih yang berpikir kritis dan dapat bertanggung jawab.

KPU Jakarta Utara menanggapi situasi ini dengan melaksanakan Program Pendidikan Pemilih di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang mencakup kegiatan penyebaran informasi mengenai nilai-nilai demokrasi, proses pemilihan umum, tahapan pemilu, hak dan tanggung jawab para pemilih, serta praktik teknis dalam pencoblosan. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam "Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 mengenai Pedoman Teknis untuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih", yang memberikan arahan mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih yang berfokus pada kelompok sasaran, termasuk pemilih baru. Pelaksanaan inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran politik, tingkat partisipasi, dan kemampuan pemilih baru dalam memilah informasi politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendidikan bagi pemilih baru menjadi aspek yang krusial dalam usaha menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Peran KPU Jakarta Utara melalui inisiatif pendidikan pemilih di tingkat SMA/SMK adalah langkah strategis untuk membangun kesadaran politik mulai dari awal, meningkatkan pemahaman tentang demokrasi, dan mengurangi kemungkinan apatisme politik dan perilaku memilih yang kurang informasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dari KPU Jakarta Utara berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pemilih baru, sehingga di masa mendatang bisa menjadi acuan dalam pengembangan program pendidikan pemilih yang lebih efektif dan berlanjut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara dalam meningkatkan kesadaran pemilih baru melalui program pendidikan pemilih di tingkat SMA/SMK di wilayah Jakarta Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji secara mendalam peran edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara dalam meningkatkan kesadaran pemilih baru melalui program pendidikan pemilih di tingkat SMA/SMK. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, makna, serta dinamika sosial yang muncul dalam

pelaksanaan program pendidikan pemilih, bukan pada pengukuran angka atau variabel statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan realitas empiris secara komprehensif berdasarkan pengalaman aktor-aktor yang terlibat langsung dalam program. Hal ini sejalan dengan pandangan (Lexy J Moleong, 2019) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui perspektif subjek penelitian. Subjek penelitian dalam studi ini meliputi pihak KPU Jakarta Utara yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan pemilih di SMA/SMK. Penelitian ini dilakukan selama ……..

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang detail mengenai strategi edukasi, bentuk sosialisasi, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Selain itu, observasi nonpartisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung jalannya kegiatan pendidikan pemilih, interaksi antara narasumber dan siswa, serta tingkat partisipasi peserta. Data juga diperkuat melalui studi dokumentasi berupa foto kegiatan, materi sosialisasi, laporan pelaksanaan, dan arsip resmi KPU Jakarta Utara, sehingga penelitian ini memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Kiwang et al., 2015). Pada tahap reduksi data, peneliti memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran edukasi dan sosialisasi KPU Jakarta Utara dalam meningkatkan kesadaran pemilih baru. Tahap ini penting untuk menghindari data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Penyajian data ini juga membantu dalam proses interpretasi terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan makna dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar temuan penelitian lebih kredibel. Langkah ini sesuai dengan pendapat (Creswell, 2018) yang menekankan pentingnya validitas dan kredibilitas dalam penelitian kualitatif melalui triangulasi data. Dengan prosedur analisis tersebut, penelitian ini diharapkan

mampu menghasilkan temuan yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Program pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan elemen kunci dalam meningkatkan pemahaman politik dan keterlibatan pemilih baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. KPU melaksanakan kegiatan ini dari tingkat pusat hingga ke daerah, dengan menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pelajar yang berada di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Program ini dirancang bukan hanya sebagai bagian dari sosialisasi teknis pemilu, tetapi juga sebagai pendidikan demokrasi yang berkelanjutan, dengan penekanan pada pemahaman hak dan tanggung jawab warga negara sebagai pemilih. Pendidikan untuk pemilih di sekolah dipahami sebagai pengenalan bagi siswa atas proses pemilu dan pentingnya keterlibatan politik yang bersifat informatif dan interaktif, sehingga saat mereka mencapai usia untuk memilih, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang demokrasi dan prosedur pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki peran strategis dalam memperkuat kesadaran serta partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Fungsi ini secara organisasi dikelola oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang menitikberatkan pada usaha untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak demokrasi dan pentingnya keterlibatan aktif dalam pemilu. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa pendidikan pemilih adalah alat krusial dalam menciptakan demokrasi yang inklusif, terutama di tengah kondisi rendahnya literasi politik di masyarakat. Tujuan dari pendidikan pemilih ini bukan hanya untuk memfasilitasi meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu, tetapi juga untuk mencetak individu pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Secara Kelembagaan, KPU memiliki divisi khusus yang fokus pada sosialisasi, pendidikan bagi pemilih, serta keterlibatan masyarakat. Tugas dari divisi ini adalah untuk menjelaskan kepada publik tentang hak dan tanggung jawab dalam demokrasi, utamanya hak untuk memberikan suara dalam pemilu serta pemilihan. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih, KPU berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat demi menghindari sikap acuh tak acuh, serta memotivasi mereka untuk berperan aktif dalam proses demokrasi.

Pentingnya edukasi pemilih menjadi semakin signifikan ketika ditujukan kepada pemilih yang baru, seperti pelajar SMA dan SMK. Kelompok ini dianggap masih memiliki sedikit pengalaman dan pemahaman tentang sistem pemilihan. Oleh sebab itu, mereka perlu diberikan wawasan sejak dini agar bisa menjadi smart voter. Pendidikan pemilih membantu pelajar memahami makna pemilu, menyadari pentingnya memilih dengan dasar yang rasional, serta mempertimbangkan rekam jejak dan visi serta misi dari para calon. Dengan cara ini, penggunaan hak suara tidak dilakukan sembarangan, melainkan didasarkan pada pemikiran yang matang.

Program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dianggap telah berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas demokrasi. Banyak siswa dan siswi menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap pemilu, walaupun sebelumnya mereka hanya mendapatkan informasi dari media sosial yang belum tentu akurat. Kehadiran KPU di lingkungan sekolah sangat penting dalam menyampaikan informasi yang valid dan dapat diandalkan, sekaligus mendorong siswa agar tidak menjadi bagian dari golongan yang tidak memberikan suara saat mereka memiliki hak untuk memilih di masa depan. Namun, dalam praktiknya, KPU menghadapi berbagai kendala. perbedaan karakteristik masyarakat dan besarnya aliran informasi di platform media sosial menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang keliru atau mengandung bias dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, bahkan menimbulkan sikap apatis terhadap program pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU. Sebagian dari masyarakat cenderung mempercayai satu sumber informasi tertentu tanpa melakukan pengecekan kembali, sehingga kurang mau menerima edukasi resmi dari institusi penyelenggara pemilu.



Gambar 1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMA 45 Jakarta Utara

Diamana dari gambar 1 diatas menunjukkan bahwa program ini berlandaskan hukum yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 9 Tahun 2022 mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihaan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Aturan ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan demokrasi, dengan KPU memiliki tanggung jawab untuk mengadakan berbagai bentuk partisipasi bagi masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun peraturan ini tidak secara rinci menjelaskan metode pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, peraturan ini mencantumkan prinsip, tujuan, dan batasan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan, yang memungkinkan realisasinya melalui program pendidikan pemilih sebagai manifestasi nyata dari penerapan prinsip partisipasi warga dalam sistem demokrasi. Program ini juga sejalan dengan arahan Rencana Strategis (Renstra) KPU yang ditetapkan pada setiap periode tertentu dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahunan. Renstra ini biasanya mengharuskan KPU untuk merancang dan mengimplementasikan program yang menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk dalam hal pendidikan pemilih. Dalam konteks Renstra KPU, pendidikan pemilih menjadi elemen penting dari upaya strategis untuk membangun pemilih yang memiliki literasi politik yang baik, memahami pokok-pokok demokrasi, serta memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan hak pilih dengan benar. Program di sekolah memainkan peranan yang vital dalam strategi ini, mengingat generasi muda akan menjadi pilar utama partisipasi politik di masa mendatang.



Gambar 2. Sesi Interaktif dengan siswa pada Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Dimana dari gambar 2 tersebut terlihat adanya interaksi antara sosialisasi dengan siswa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Atikah, S. H., yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhumas) serta Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU Kota Administrasi Jakarta Utara, terungkap bahwa dari perspektif sumber daya manusia(SDM), implementasi program pendidikan pemilih dilakukan melalui kolaborasi terstruktur antara para komisioner dan sekretariat KPU. Komisioner berfungsi sebagai narasumber utama yang memberikan materi pendidikan pemilih kepada peserta, sementara staf sekretariat berperan dalam dukungan teknis dan operasional, mencakup persiapan acara, koordinasi di lapangan, sampai pada dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

Penentuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran dalam program pendidikan pemilih dilakukan melalui kerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang selanjutnya memfasilitasi komunikasi antara KPU dan sekolah-sekolah di area tersebut. Selanjutnya, materi pendidikan pemilih yang disampaikan kepada siswa SMA dan SMK umumnya mencakup pengenalan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemilihan umum secara luas, termasuk hak dan kewajiban pemilih serta signifikansi partisipasi dalam pemilu. Cara penyampaian materi dibuat interaktif melalui diskusi, permainan, dan kuis agar siswa lebih tertarik dan mudah menangkap inti dari materi. KPU juga mengaitkan pendidikan pemilih dengan praktik demokrasi yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti pemilihan ketua OSIS, sehingga para peserta didik dapat langsung menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan sekolah dan sehari-hari mereka.

Evaluasi efektivitas program pendidikan pemilih yang dijalankan oleh KPU dilakukan dengan memantau reaksi serta tingkat antusiasme peserta sepanjang kegiatan. Keterlibatan aktif siswa, baik lewat pertanyaan atau penyampaian sudut pandang dan ide, dipandang sebagai tanda awal keberhasilan program. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa materi serta metode penyampaian yang digunakan berhasil menarik perhatian dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang masalah demokrasi dan pemilihan umum. Lebih dari itu, KPU juga menerapkan beberapa strategi untuk mengenali dan mengatasi kendala koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan membangun komunikasi langsung dengan pihak sekolah. Pendekatan ini dilakukan terutama di sekolah-sekolah yang siswa-siswanya menjalani program magang di KPU, sehingga koordinasi dapat berjalan lebih baik dan kegiatan pendidikan pemilih tetap terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ke depan, KPU memahami pentingnya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) internal guna mengoptimalkan pelaksanaan program

pendidikan pemilih. Peningkatan kemampuan ini mencakup public speaking, penggunaan metode komunikasi yang inovatif dan menarik, serta pengenalan terhadap karakteristik generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha. Kemampuan ini dianggap penting agar pesan pendidikan pemilih dapat disampaikan dengan lebih relevan dan efektif, sejalan dengan perubahan zaman dan preferensi audiens. Melalui penguatan kapasitas SDM, KPU diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyampaian materi dan juga memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga edukatif yang profesional dan kredibel. Secara keseluruhan, program pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU adalah sebuah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, KPU tidak hanya mendorong partisipasi pemilih, tetapi juga membentuk generasi warga negara yang memiliki kesadaran politik, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan Bangsa.

PEMBAHASAN

Program pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih baru, khususnya di kalangan pelajar SMA dan SMK. Pendidikan pemilih dipahami tidak hanya sebagai sosialisasi teknis pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Almond & Verba, 2015) yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan fondasi utama dalam membentuk budaya politik partisipatif. Melalui pendekatan edukatif yang sistematis, siswa diperkenalkan pada nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendidikan semacam ini membantu membangun kesadaran politik sejak dini sebelum mereka menjadi pemilih aktif. Dengan demikian, peran KPU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan transformatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran KPU di lingkungan sekolah mampu menjembatani kesenjangan informasi politik yang selama ini didominasi oleh media sosial. Hal ini memperkuat argumen bahwa lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab moral dalam mencerdaskan pemilih.

Peran kelembagaan KPU Jakarta Utara dalam pendidikan pemilih tercermin melalui fungsi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Divisi ini menjadi ujung tombak dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan edukasi politik di sekolah. Menurut (Reber, 2022), efektivitas pendidikan pemilih sangat dipengaruhi oleh kapasitas

institusional dan konsistensi program yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, KPU Jakarta Utara telah menunjukkan komitmen kelembagaan dengan menjadikan pendidikan pemilih sebagai program prioritas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa struktur organisasi yang jelas memudahkan koordinasi internal serta distribusi tugas antara komisioner dan sekretariat. Komisioner berperan sebagai komunikator utama, sedangkan sekretariat mendukung dari sisi teknis dan administratif. Sinergi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan adanya pembagian peran yang terstruktur, program dapat berjalan lebih sistematis dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih bukan kegiatan insidental, melainkan bagian dari strategi kelembagaan KPU.

Pendidikan pemilih yang menyasar pelajar SMA dan SMK menjadi sangat relevan mengingat kelompok ini termasuk kategori pemilih pemula yang rentan terhadap disinformasi politik. Penelitian sebelumnya oleh (Galston, 2024) menegaskan bahwa pemilih muda cenderung memiliki tingkat literasi politik yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia dewasa. Temuan penelitian ini menguatkan kondisi tersebut, di mana sebagian besar siswa memperoleh informasi politik dari media sosial yang belum tentu valid. Oleh karena itu, intervensi KPU melalui pendidikan pemilih di sekolah menjadi krusial untuk menyeimbangkan arus informasi tersebut. Program ini memberikan sumber informasi resmi dan terpercaya yang berbasis pada regulasi pemilu dan prinsip demokrasi. Selain itu, pendekatan edukatif yang dilakukan membantu siswa memahami makna pemilu secara substantif, bukan sekadar prosedural. Dengan pemahaman tersebut, siswa didorong untuk menjadi pemilih rasional dan kritis. Pendidikan pemilih dengan demikian berfungsi sebagai upaya preventif terhadap perilaku memilih yang irasional di masa depan.

Metode penyampaian pendidikan pemilih yang bersifat interaktif menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program ini. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Jakarta Utara menggunakan diskusi, permainan, dan kuis sebagai strategi pembelajaran. Pendekatan ini sesuai dengan teori pembelajaran partisipatif yang dikemukakan oleh (Maulidah & Kamal, 2020) dan (Mujtahid et al., 2025), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam proses belajar. Metode interaktif terbukti mampu meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan. Siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat dalam dialog dan pertukaran gagasan. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Dengan metode tersebut, nilai-nilai demokrasi dapat disampaikan secara kontekstual dan mudah dipahami. Keterlibatan aktif ini menjadi indikator

awal meningkatnya kesadaran politik siswa. Maka kaena itu, pendekatan pedagogis yang tepat menjadi kunci keberhasilan pendidikan pemilih.

Pengaitan materi pendidikan pemilih dengan praktik demokrasi di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS, merupakan strategi yang efektif dalam membumikan nilai-nilai demokrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Asril et al., 2023) yang menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik. Melalui analogi pemilihan OSIS, siswa dapat memahami prinsip pemilu secara praktis, mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara. Pendekatan ini membantu siswa melihat bahwa demokrasi bukan konsep abstrak, melainkan praktik yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan pemilih menjadi lebih relevan dan aplikatif. Strategi ini juga mendorong internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam perilaku sehari-hari siswa. Pemahaman yang diperoleh di sekolah diharapkan dapat terbawa hingga mereka menjadi pemilih aktif di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi.

Meskipun program pendidikan pemilih menunjukkan dampak positif, hasil penelitian juga mengungkap adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mengandung disinformasi politik. Menurut (Wardle & Derakhshan, 2017), disinformasi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Temuan ini relevan dengan kondisi di lapangan, di mana sebagian siswa dan masyarakat lebih mempercayai informasi dari satu sumber tertentu tanpa verifikasi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pesan edukatif yang disampaikan oleh KPU. Selain itu, perbedaan karakteristik sekolah dan latar belakang siswa juga menjadi tantangan tersendiri. KPU perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi agar dapat diterima oleh berbagai kelompok. Tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih memerlukan strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi program menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang.

Dari sisi sumber daya manusia, penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM KPU menjadi faktor penentu keberhasilan program pendidikan pemilih. Wawancara dengan pihak KPU Jakarta Utara mengungkap bahwa kolaborasi antara komisioner dan sekretariat berjalan cukup efektif. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Sihite, 2023) yang menekankan pentingnya kualitas SDM dalam keberhasilan program organisasi publik. Namun demikian, KPU menyadari perlunya peningkatan kompetensi, khususnya dalam hal public speaking dan

pemahaman karakter generasi muda. Generasi Z dan Alpha memiliki preferensi komunikasi yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan digital. Penguatan kapasitas SDM diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi program pendidikan pemilih. Dengan SDM yang kompeten, pesan demokrasi dapat disampaikan secara lebih persuasif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Landasan hukum program pendidikan pemilih, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, memberikan legitimasi kuat terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu sebagai pilar demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi belum mengatur metode secara rinci, KPU mampu menginterpretasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam program konkret. Hal ini sejalan dengan pandangan (Muminah & Suprajogo, 2025) bahwa implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas aktor pelaksana. Selain itu, keselarasan program pendidikan pemilih dengan Rencana Strategis KPU menunjukkan adanya kesinambungan antara kebijakan dan praktik. Renstra KPU menempatkan pendidikan pemilih sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan partisipasi dan literasi politik. Dengan demikian, program pendidikan pemilih di sekolah dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan demokrasi. Hal ini memperkuat posisi KPU sebagai institusi demokratis yang berorientasi pada pembangunan kesadaran warga negara.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa program pendidikan pemilih KPU Jakarta Utara merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi. Pendidikan pemilih tidak hanya meningkatkan partisipasi elektoral, tetapi juga membentuk karakter pemilih yang kritis dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Manik et al., 2024) yang menekankan hubungan erat antara pendidikan kewargaan dan kualitas demokrasi. Dengan membekali pemilih baru sejak dini, KPU berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural. Program ini membantu menciptakan generasi pemilih yang sadar akan hak dan kewajibannya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya KPU menunjukkan arah yang positif dan strategis. Oleh karena itu, penguatan program pendidikan pemilih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat tumbuh dengan fondasi kesadaran politik yang kuat di kalangan generasi muda.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa program sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara lewat pelatihan pemilih di SMA/SMK berfungsi untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Inisiatif ini berhasil memperluas pengetahuan siswa tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya keterlibatan dalam pemilihan umum. Penyampaian materi dengan cara yang interaktif dan kontekstual memfasilitasi partisipasi aktif dari peserta serta membantu siswa memahami lebih jelas tentang proses demokrasi. Meskipun masih ada tantangan berupa pengaruh informasi yang tidak tepat di platform media sosial dan beragamnya karakter peserta didik, secara keseluruhan, program pendidikan pemilih yang diadakan KPU Jakarta Utara dianggap cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran pemilih baru serta mendukung peningkatan kualitas demokrasi. KPU Jakarta Utara terus berinovasi dalam program pendidikan pemilih dengan memperkuat metode komunikasi yang kreatif dan menyesuaikan materi dengan karakteristik generasi muda. Peningkatan penggunaan media digital yang informatif dan dapat dipercaya diperlukan untuk menghadapi derasnya informasi di media sosial. Di samping itu, kerjasama yang berkelanjutan dengan sekolah dan dinas pendidikan harus diperkuat agar program pendidikan pemilih dapat diadakan secara teratur dan terintegrasi dalam sistem pendidikan. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan pemilih menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar wilayah, guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dampak program pendidikan pemilih terhadap partisipasi politik pemilih baru.

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam kajian pendidikan politik dan kepemiluan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran lembaga penyelenggara pemilu dalam pendidikan pemilih, khususnya pada konteks pemilih pemula di lingkungan sekolah menengah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan mampu membentuk kesadaran politik sejak dini dan mendukung terciptanya budaya demokrasi yang partisipatif. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi program pendidikan pemilih oleh KPU Jakarta Utara, termasuk strategi, metode, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi KPU di tingkat daerah maupun nasional dalam merancang program pendidikan pemilih yang lebih efektif dan adaptif terhadap karakteristik generasi muda. Selain

itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengintegrasikan pendidikan demokrasi ke dalam kegiatan pembelajaran.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Mengkaji efektivitas program pendidikan pemilih dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan intensi partisipasi politik siswa secara lebih terukur. 2) Memperluas lokasi dan subjek penelitian dengan melibatkan lebih banyak sekolah atau wilayah lain, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas. 3) Difokuskan pada peran media digital dan media sosial sebagai sarana pendidikan pemilih, mengingat tingginya paparan informasi politik pada generasi muda. 4) Mengeksplorasi kolaborasi antara KPU, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan. Dengan pengembangan fokus dan metode tersebut, diharapkan penelitian ke depan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemilih dan partisipasi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PSUTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.

Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIMPS: Jurnal Education, Sosial Science*, *8*(315). https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25109 [Broken link]

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, *8*(1), 139–157. https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082

Galston, W. A. (2004). Civic education and political participation. *PS: Political Science & Politics*, *37*(2), 263–266. https://doi.org/10.1017/S1049096504004202

Halilah, S. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *5*(1), 39–61. https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/470

Husni, Wazid, M., & Harmanto, H. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *9*(2), 374–388. https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p374-388

Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *19*(1), 71. https://doi.org/10.22146/jkap.7535

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*. https://jdih.kpu.go.id/view/peraturan/1424

Manik, T. S. M., Purwantiningsih, A., & Riyanti, D. (2024). Konstruksi Ideal Warga Negara Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu Tinjauan Literatur. *Integralistik*, *35*(1), 210–239. https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik/article/view/2486

Maulidah, H., & Kamal, B. (2020). Studi Komparatif Metode Cooperative Learning Tipe Jigsaw dan Metode Ceramah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Prodi D3 Akuntansi pada Mata Kuliah Akuntansi Biaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *14*(1), 144. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.17359

Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Implementasi Pembelajaran Mendalam (Depp Learning) di Sekolah Dasar sebagai Penguatan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dan Usia Dini*, *2*(2), 31–36. https://sihojurnal.com/index.php/pedasud/article/view/711

Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management, & Business*, *8*(4), 1485–1495. https://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/1253 [Broken link]

Purnamasari, P., & Rahim, E. I. (2025). Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. *Jurnal Hukum Legalita*, *7*(2), 416–424. https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/2120 [Access restricted]

Reber, B. (2022). Critical citizenship and democratic legitimacy. *Philosophy & Social Criticism*, *48*(9), 1199–1225. https://doi.org/10.1177/01914537221079679

Sihite, D. T. S. (2023). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, *4*(1), 77–83. https://doi.org/10.51667/pwjsa.v4i1.1411 [Access restricted]

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe. https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c